



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 11 November 2020

Halaman: 5

► MALIOBORO BEBAS KENDARAAN

Anggota PPMAY Geruduk Kepatihan

JOGJA—Puluhan pemilik toko di Kawasan Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) mendatangi kompleks Kepatihan, Jogja. Mereka ingin menanyakan kejelasan kebijakan uji coba Malioboro bebas kendaraan bermotor karena dianggap merugikan.

*Hery Setiawan
redaksi@harianjogja.com*

Kebijakan uji coba pedestrianisasi (pembebasan jalan dari kendaraan bermotor) di Malioboro membuat PPMAY kaget. Baik Pemprov DIY maupun Pemkot Jogja dianggap tak pernah melibatkan atau pun menyosialisasikan rencana penyusunan kebijakan tersebut.

PPMAY menyebut adanya penurunan pendapatan sebesar 80 % sejak penerapan uji coba pedestrianisasi di Kawasan Malioboro.

PPMAY pun meminta kepada pemerintah untuk merumuskan ulang kebijakan uji coba pedestrianisasi di Kawasan Malioboro.

Penerapan uji coba pedestrianisasi Kawasan Malioboro dianggap merugikan mereka karena omzet merosot tajam. "Kami justru tahu dari media dan selama ini tidak pernah dilibatkan [oleh pemerintah]. Apalagi, pemberlakuannya sampai dua pekan," ujar Ketua PPMAY, Sadana Mulyono di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/9).

Sadana mengatakan pemerintah seolah tidak mengajak berdiskusi pengusaha yang saban hari menjajakan dagangannya di kawasan Malioboro. Padahal, para pengusaha yang didominasi oleh pemilik toko dikatakan sebagai kelompok masyarakat terdampak dari kebijakan tersebut.

Sebelumnya, PPMAY menyebut adanya penurunan pendapatan sebesar 80 % sejak penerapan uji coba pedestrianisasi di Kawasan Malioboro.

Kondisi itu bagi para pemilik toko bak peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Belum pula bangkit dari dampak Pandemi Covid - 19, mereka justru dihadapkan pada kebijakan yang cukup memberatkan. Atas dasar itulah, pihaknya meminta agar pemerintah mau mendengar suara mereka.

"Kami sebenarnya ikut saja dengan kebijakan ini. Tapi ya harusnya kami dilibatkan dan aspirasi kami ditampung. Supaya kebijakan ini ada solusi dan kami bisa bernapas," katanya.

PPMAY pun meminta kepada pemerintah untuk merumuskan ulang kebijakan uji coba pedestrianisasi Malioboro.

Menurut Sadana, tak masalah jika Malioboro diterapkan aturan tanpa kendaraan. Hanya saja, waktunya cukup beberapa jam saja lantaran Malioboro merupakan jalur keluar-masuk utama para pemilik toko.

"Kalau [hanya diterapkan] beberapa jam saja kan kami juga bisa kirim barang dan bisa akses jalan. Karena kebanyakan pedagang yang di Malioboro itu hanya punya satu akses saja sehingga mau tidak mau mesti lewat Malioboro," katanya.

Koordinator Lapangan PPMAY, Karyanto Yudomulyono menuturkan bahwa pemerintah seolah tak mau mendengar aspirasi dan suara para pengusaha. Permohonan audiensi, menurut dia telah berkali-kali diajukan. "Suara kami tidak ditanggapi dan sudah sering sekali kami berkirim surat. Ini yang kali ketiganya kami kirim surat," kata Karyanto.

Belum Bisa Bertemu

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad selaku perwakilan pemerintah akhirnya menemui puluhan pemilik toko yang tiba di Kepatihan. Ia menyebut, surat yang diajukan oleh PPMAY baru pada masuk Senin (9/11) sore.

Pada Selasa, menurut Noviar, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji belum bisa menemui atau menerima audiensi dari PPMAY lantaran sudah punya agenda lain.

Suara kami tidak ditanggapi dan sudah sering sekali kami berkirim surat. Ini yang kali ketiganya kami kirim surat.

Karyanto Yudomulyono
Koordinator Lapangan PPMAY

Nilai Berita	Sifat
☐ Negatif	☐ Amat Segera
☐ Positif	☐ Segera
☐ Netral	☐ Biasa

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005